ANALISIS KESIAPAN DESA MEKAR AGUNG KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK BANTEN SEBAGAI DESA WISATA SYARIAH

Tati Handayani[1],Mira Rahmi[2,]

[1,2,]Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS Fatmawati no1 , Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Email: tatihandayani01@gmail.com[1,] mira.upn@gmail.com[2,]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi yang dimiliki desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak sebagai desa Wisata Syariah dan mengkaji potensi wisata yang cocok untuk desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak sebagai desa Wisata Syariah.Metode penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan menggunakan masyarakat dan pemuka masyarakat sebagai respondennya. Teknik pengumpulan data menggunakan motode observasi, wawancara berstruktur, dan dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Mekar Agung, berupa wisata pertanian (wisata agro) dan wisata budaya. Namun kesiapan sebagai kawasan wisata secara fisik menunjukkan fasilitas, dan infrastruktur kepariwisataan yang dimiliki oleh kawasan masih belum memadai. Kesiapan secara non fisik juga menunjukkan kondisi yang belum siap. Oleh karena itu dalam pengembangannya perlu strategi, berupa pembangunan sarana fisik maupun non fisik. Untuk dapat menjadi objek wisata pedesaan syariah yang ideal dan mampu bersaing maka dalam pengembangannya perlu strategi berupa pembangunan sarana fisik maupun non fisik.

Kata kunci : kesiapan, potensi, desa wisata syariah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 butir 3). Usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, spa dan lain-lain (Pasal 14).

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata (Swarbrooke 1996). Dalam pengembangan pariwisata diperlukan aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah aspek fisik atau geografi, aspek daya tarik pariwisata, aspek aksesibilitas, aspek aktivitas dan fasilitas, aspek sosial ekonomi dan budaya. Beberapa upaya telah diupayakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stakeholders lainnya seperti sektor industri pariwisata untuk membangun strategi pembangunan tujuan pariwisata diantaranya:

a. Meningkatkan daya tarik daerah tujuan Wisata Syariah: mengembangkan family friendly holiday destinastion berbasis syariah.
b. Pemasaran pariwisata nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara muslim, meningkatkan muslim visitor arrivals.

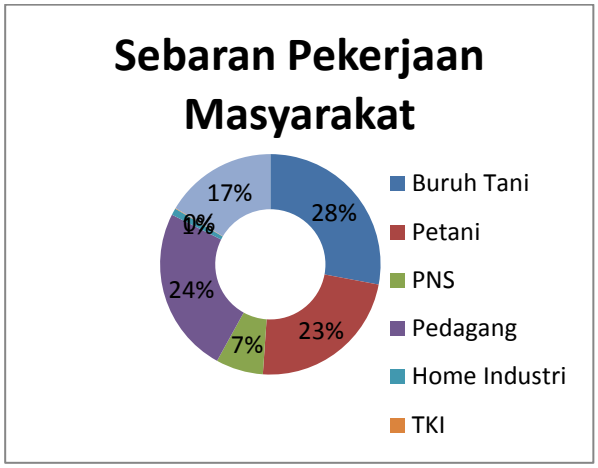
c. Pembangunan industri pariwisata: mendorong standar usaha pariwisata syariah seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan dan spa serta meningkatkan pilihan accommodation options for syariah.
d. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata: membangun SDM pariwisata syariah, meningkatkan upaya mewujudkan ease of communication (Suherlan, 2015).

Lebih lanjut, Wisata Syariah bukanlah wisata eksklusif yang hanya diperuntukkan untuk kelompok wisatawan tertentu, hal ini dikarenakan wisatawan non-muslim juga dapat menikmati keindahan, pelayanan, serta segala macam daya tarik wisata yang beretika syariah (Gilang, 2015). Wisata Syariah memiliki produk dan jasa wisata yang serupa dengan konsep wisata secara konvensional hanya perbedaannya semua pendekatan dan kebijakan yang diterapkan mengacu kepada nilai-nilai Syariah Islam. Indonesia akan mengembangkan sembilan tujuan wisatawa syariah yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok (Asdhiana, 2014). Sembilan wilayah tujuan Wisata Syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakatnya, produk wisata daerah, serta akomodasi wisatanya.

Banten sebagai salah satu wilayah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata. Hal ini tentunya dinilai dari kesiapan Banten dari sisi infrastruktur maupun kesiapan masyarakat secara keseluruhan juga meliputi dunia usaha serta pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangannya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sebanyak 204 Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berada di Banten dengan rincian 84 objek wisata alam, 34 wisata sejarah dan budaya, 24 wisata buatan, sembilan objek wisata living culture dan 48 wisata atraksi kesenian, serta keragaman wisata dan budaya, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, agro wisata, museum, perhotelan dan industri kreatif, dan adanya 18 even unggulan yang berlangsung di Banten seperti Panjang Mulud, Cilegon Etnic Carnaval, Seba Baduy, Hari Jadi Pandeglang, Festival Kuliner dan Cinderamata, Festival Museum dan Religi Banten, Festival Cisadane, Seren Taun, Pemilihan Duta Wisata, dan kegiatan promosi wisata lainnya (sumber : https://titiknol.co.id/pemerintahan/dispar-serius-genjot-pariwisata-banten/, diakses 25 Januari 2018). Hal ini menunjukkan bahwa agrowisata syariah dapat dikembangkan. Keragaman masyarakat Kecamatan Cibadak yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lebak, Banten juga tentunya menjadi peluang besar sekaligus tantangan dalam. mengembangkan pariwisata syariah ini.

Gambar 1

Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kecamatan Cibadak



Sumber : Hasil Olah Data Statistika Kecamatan Cibadak dalam Angka tahun 2016

Kecamatan Cibadak yang berada di Kabupaten Lebak Banten dikategorikan sebagai wilayah dengan jumlah desa tertinggal yang cukup tinggi (Peraturan Presiden No. 131, 2015). Kecamatan yang terdiri dari 15 desa ini memiliki penduduk sebesar 60.962 jiwa. Dari jumlah tersebut, 5.652 jiwa di antaranya berprofesi sebagai buruh tani, 4.681 jiwa sebagai petani, 1.406 jiwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4.935 jiwa sebagai pedagang, 202 jiwa memiliki home industri, 18 jiwa sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan 3.334 jiwa berprofesi lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa buruh tani dan petani merupakan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Cibadak dengan total 51%. Sementara 24% masyarakat berprofesi sebagai pedagang kecil dan 17% berprofesi lainnya. Ironisnya, kabupaten Lebak Banten ini menjadi salah satu penyumbang kenaikan angka kemiskinan di provinsi Banten (Titiknol, 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada 29 Maret 2017 lalu juga telah merilis data Kemiskinan di Provinsi Banten. Dalam rilisnya tersebut, angka kemiskinan di Provinsi Banten naik sebanyak 0,9% dari data sebelumnya yang

mencapai 5,36 Persen dari total penduduk di Provinsi Banten (BPS, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, capaian indikator makro sektor pariwisata terhadap kemiskinan mencapai 5,42 persen dari target 4,9 persen di tahun 2016 lalu. Sementara itu, kontribusi pada PDB Nasional di tahun 2017 mencapai 13 persen dan mampu menyerap tenaga kerja 12,4 persen tenaga kerja, artinya, bidang pariwisata juga memiliki dampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran.

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Cibadak adalah desa Mekar Agung. Desa Mekar Agung dengan potensi yang dimiliki yaitu desa pertanian, maka disini dapat memberikan peluang kepada desa untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian atau agrowisata. Pariwisata (termasuk sektor agrowisata) merupakan sektor strategis untuk dikembangkan dalam suatu daerah karena sektor pariwisata memiliki nilai signifikan bagi kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu daerah baik dalam skala lokal maupun global. Sebagai daerah yang mempunyai potensi yang sangat besar di sektor pertanian, perlu dilakukan penanganan yang lebih serius terhadap kekayaan dan potensi tersebut. Penanganannya perlu diarahkan agar agrowisata menjadi objek wisata yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan keunikan, keunggulan lokal dan berdasarkan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu kegiatan untuk mengidentifikasi potensi pertanian di Desa Mekar Agung yang dapat dikembangkan menjadi agrowisata syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan langkah-langkah strategi yang kongkrit dan operasional guna tercapainya kemantapan pengelolaan objek agrowisata syariah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak dan masyarakat pada umumnya.

1.2. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah kesiapan desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak sebagai desa Wisata Syariah untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat?
b. Potensi wisata apa saja yang cocok untuk desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak sebagai desa Wisata Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkaji kesiapan desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak sebagai desa Wisata Syariah untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata syariah di desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak.

2. METODOLOGI

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah desa Mekar Agung ,kecamatan Cibadak, kabupaten Lebak, Banten Alasan dipilihnya lokasi ini karena keunikan-keunikan budaya masyarakatnya yang ramah , mudah bekerja sama dan mau menerima perubahan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yaitu, proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, dimulai dengan menelaah seluruh data yang berasal dari berbagai sumber (wawancara, pengamatan, dan dokumen resmi, gambar, foto, dsb), mereduksi data dengan cara membuat abstraksi (rangkuman inti), menyusun dalam satuan-satuan, dikategori-sasi, koding, mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan menafsirkan data menjadi suatu teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

Tabel. Definisi Operasional

		2.Restaurant/Penyedia Makananan dan Minuman	1. Terjamin kehalalan Makanan dan Minuman dengan sertifikasi Halal MUI 2. Ada jaminan Halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya 3. Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih
		3. Biro Perjalanan Wisata	1. Menyediakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah 2. Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan 3. panduan umum akomodasi pariwisata syariah 4. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah
		4. Pramuwisata	1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas 2. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab 3. Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	*Smart Enviroment*	1. Alam 2. Budaya 3. Buatan	1. Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata 2. Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di Objek wisata. 3. Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata. 4. Tersedia makanan dan minuman halal
2	*Smart Living*	1.Penginapan	1. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci 2. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah 3. Tersedia makanan dan minuman yang halal 4. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis 5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan

Responden yang diwawancarai adalah pemangku jabatan dan masyarakat. Untuk mendapatkan data dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner dimana dalam pengambilan sampelnya menggunakan accidental sampling. Berpedoman dari apa yang diungkapkan oleh Rescoe dalam Sugiono (2001: 103) besarnya sample yang dianggap dapat mewakili dalam suatu penelitian antara 30 sampai 500 responden, maka besarnya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang responden. Menurut Bungin (2003), beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan responden atau informan antara lain:

Berdasarkan syarat–syarat pemilihan responden tersebut, maka dapat dirumuskan syarat–syarat tersebut meliputi, sebagai berikut:

1) Masyarakat yang telah tinggal di wilayah penelitian minimal 3 tahun.
2) Masyarakat yang mengerti potensi dan permasalahan di wilayah penelitian.
3) Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wilayah penelitian secara administratif baik secara aktif maupun pasif di wilayah penelitian.

2.3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik ini merupakan hasil kesimpulan dari survei langsung di lapangan berupa observasi, wawancara, dan kuesioner yang dikolaborasikan dengan survei teori dan kebijakan.

3. LANDASAN TEORI

Konsep Wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai ke Islaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma ke Islaman (Tourism Review, 2013). Konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus manjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015). Sofyan (2012:33) menegaskan

3	*Smart Mobility*	1. Informasi 2. Keterjangkauan	1. Kemudahan akses informasi wisata syariah/halal 2. Objek wisata mudah dijangkau 3. Transportasi (darat. Laut, udara) mudah 4. Biaya transportasi sesuai dengan yang standard
4	*Smart People*	1. Kelembagaan 2. Pemberdayaan Masyarakat	1. Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata. 2. Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata. 3. Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata. 4. Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal 5. Sikap masyarakat

bahwa definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Adapun kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Diyanat Isleri Baskanlig, 2011). Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Istilah sebaliknya adalah "haram" yang mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.Selain itu, definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di Timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di Barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syariah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek (Ijaj, 2011). Selain itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari.

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana Sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Tim Penyusun: 2014, 14-15). Sedangkan yang dimaksud dengan Desa Wisata Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan pedesaaan yang menawarkan keseluruhansuasana yang mencerminkan keaslian perdesaaan baik dari kehidupansosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untukdikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atarksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin: 2001, 38). Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.

Pada dasarnya, tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (Dini Andriani dkk: 2015, 19-20) :

1) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat,artefak budaya, dsb) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
2) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir-pantai, dsbnya). Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
3) Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).
4) Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dsb) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah

tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.

Adapun desa wisata syariah atau desa wisata halal merupakan sebuah pemikiran atau gagasan tentang integrasi antara desa wisata, wisata syariah dan kearifan lokal, karakteristik pariwisata syariah menurut Chukaew (2015), ada delapan faktor standar dalam pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan, hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Pelayanan kepada wisatawan haruslah cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip prinsip Islam
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan oleh Chukaew (2015), terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah, diantaranya :

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
3. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata .
4. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg (dalam Sahida, 2009), pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata halal. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Aan Jaelani: 2017, 13). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi

a. Menurut Nurisyah (2001), secara spesifik, wisata agro atau wisata pertanian ini adalah rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau kawasan dan sektor pertanian mulai dari awal sampai dengan produk pertanian dalam berbagai sistem, skala dan bentuk dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian ini. Dalam istilah sederhana, agrotourism didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian dimana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu makanan atau melewatkan malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman. Sutjipta (2001) mendefinisikan, agrowisata sebagai sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Ecotourism dan agrotourism pada dasarnya memiliki prinsip yang sama. Menurut Wood (2000) dalam Pitana (2002), prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan

kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata;

b. Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian;
c. Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang bekerja sama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian;
d. Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, manajemen sumber daya alam dan kawasan yang dilindungi;
e. Memberi penekanan pada kebutuhan zona pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut;
f. Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan;
g. Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi;
h. Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerja sama dengan penduduk lokal;
i. Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan lingkungan alam dan budaya.

Pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas untuk memancing para pelaku bisnis wisata agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid (Unggul Priyadi: 2016, 94-95). Oleh karena itu, desa wisata halal bisa menjadi destinasi baru dalam berwisata untuk mengembangkan pariwisata halal.

Konsep Smart City atau Kota Pintar pada dasarnya telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan teknologi internet yang mulai digunakan dalam banyak aspek kehidupan pada saat itu. Internet dengan fitur World Wide Web-nya yang pada awalnya hanya digunakan oleh kalangan pemerintah dan akademisi, kemudian berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi media komunikasi dan transaksi massal yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan (Coe dkk.,2001). Berawal dari istilah Kota Pintar ini lahirlah pula kemudian beberapa istilah yang lain berdasarkan variasi dari definisi dan persamaan kata “smart”, seperti misalnya Intelligent City, Knowledge City, Ubiquitous City, Sustainable City, Digital City, dan sebagainya, dimana Smart City dan Digital City menjadi dua istilah yang paling sering digunakan dalam memperkenalkan konsep Kota Pintar (Cocchia, 2014)

Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata menurut (Subowo 2002) adalah melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. Giffinger et al. (2007) mengidentifikasi adanya 4 komponen kota cerdas: industri, pendidikan, partisipasi, dan infrastruktur. Menurut Lombardi et al. (2012) menyatakan bahwasanya ada 6 komponen dengan beberapa perbedaan aspek dalam kehidupan yakni: smart economy (industri), smart mobility (logistik dan infrastruktur), smart environment (efisiensi dan keberlanjutan), smart people (pendidikan), smart living (keamanan dan kualitas), dan smart governance (e-governance).

Menurut Nam and Pardo (2011), komponen kunci dari kota cerdas merupakan teknologi, manusia (aktivitas, keragaman, dan pendidikan), serta lembaga (pemerintah dan kebijakan). Menurut Berardi (2013a, 2013b) menyatakan pencapaian peringkat melalui indikator kuantitatif sintesis, melalui peningkatan perhatian antara perwakilan masyarakat dan pemangku kebijakan untukmemfokuskan arahan pengembangan sumber daya dan waktunya, serta penyampaian pengembangan kota terhadap warga, pengunjung, dan investor. Adapun masing-masing komponen memiliki aspek-aspek yang seharusnya ada pada komponen, antara lain sebagai berikut:

a. Smart Economy (Semangat berinovasi, entrepreneurship, reputasi kota, produktivitas, ketenagakerjaan, integrasi internasional)

b. Smart Mobility (Sistem transportasi lokal, aksesibilitas nasional/internasional, TIK-Infrastruktur, keberlanjutan sistem transportasi)
c. Smart Environment (Kualitas udara, kesadaran ekologis, manajemen sumberdaya berkelanjutan)
d. Smart People (Edukasi, pembelajaran tata karma, keberagaman adat istiadat, keterbukaan)
e. Smart Living (Fasilitas rekreasi dan budaya, kesehatan, keamanan, kualitas permukiman, fasilitas pendidikan, atraksi menarik wisatawan, kohesi sosial)
f. Smart Governance (Kesadaran akan politik, pelayanan sosial dan publik, administrasi yang transparan dan efisien)

Dengan penjabaran mengenai konsep Smart City dan komponen-komponen terkait di atas, dapat kita ambil intisarinya bahwa konsep Smart City merupakan konsep yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan smart environment,smart living, smart mobility dan smart people sebagai batasan ruang lingkup untuk eksplorasi dalam menentukan kriteria desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak. Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah tersusunnya kriteria desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak dalam mewujudkan desa wisata syariah.

Konsep Smart Village berdasarkan dari literatur yang ada sama dengan konsep Smart City. Dari konsep tersebut telah diperoleh beberapa dimensi pembahasan yaitu komponen yang berkaitan dengan karakteristik desa Mekar Agung meliputi konsep Smart Village yang sesuai dengan syariah.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi pengembangan wisata syariah.

Desa Mekar Agung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cibadak Lebak Banten. Desa Mekar Agung memiliki potensi budaya, kerajinan dan suasana pedesaan yang telah dikembangkan menjadi desa wisata. Desa Mekar Agung sendiri masih dikategori sebagai salah satu desa tertinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sumber penghasilan Desa Mekar Agung dari bercocok tanam dan membuat kerajinan tangan. Sehingga bentuk desa wisata yang ada di Desa Mekar Agung adalah memanfaatkan potensi budaya, kerajinan serta pertanian dan kebun yang ada.

Penduduk Desa Mekar Agung ingin lebih memajukan desa untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat dan mengembangankan potensi-potensi lainnya yang ada di Desa Mekar Agung. Masyarakat Desa Mekar Agung sendiri selama ini berperan aktif dalam mengembangkan hasil pertanian dan kerajinan tangan.

Desa Mekar Agung memiliki kekayaan alam yang melimpah salah satunya adalah kekayaan alam berupa tanah yang subur sehingga bisa dijadikan pertanian. Sehingga bisa dijadikan dan patut untuk dipasarkan untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung seperti tanah yang subur salah satunya adalah . Desa Mekar Agung memiliki kekayaan alam yang patut untuk dipromosikan agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung, salah satunya adalah perkebunan. Selain profesi bertani masyarakat mulai kemudian menyadari pula pentingnya usaha selain bertani dengan membuat berbagai kerajinan tangan yang berasal dari bambu seperti saung, tempat tisu, peralatan makan, tempat tidur dan koper atau tas. Kondisi seperti ini merupakan potensi untuk lahirnya desa wisata sebagai destinasi.

4.2. Tingkat Kesiapan destinasi wisata syariah

Sebagai objek wisata, hendaknya Desa Mekar Agung memiliki kesiapan baik secara fisik maupun non fisik, hal ini penting untuk mampu memberikan pelayanan kenyamanan sebagai desa wisata.

a.Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik yang dimaksud dalam analisis ini adalah ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas desa wisata syariah. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Kesiapan Sebagai Desa Wisata Syariah

NO	ASPEK-ASPEK	KURANG	CUKUP	BAIK
1.	KESIAPAN FISIK Ketersediaan fasilitas alam,budaya dan buatan	35 orang (70%)	10 orang (20%)	5 orang (10%)
	Ketersediaan penginapan, restaurant	37 orang (74%)	11 orang (22%)	2 orang (4%)
2.	KESIAPAN NON FISIK Informasi	-	10 orang (20%)	40 orang (80%)
	Keterjangkauan	-	-	50 orang(100%)
	Kelembagaan	-	15 orang (30%)	35 orang (70%)
	Pemberdayaan masyarakat	-	25 orang (50%)	25 orang (50%)
	Biro perjalanan	47 orang (94%)	3 orang (6%)	-
	Pramuwisata	40 orang (80%)	5 orang (10%)	5 orang (10%)

Berdasarkan pengamatan dan studi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa fasilitas kepari- wisataan yang ada di Desa Mekar Agung relatif kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas tersebut pada tabel 5 .

Tabel 5. Fasilitas Wisata yang ada pada Desa Mekar Agung

No.	Jenis Fasilitas	Keterangan		Jumlah
		Ada	Tidak Ada	
1.	Penginapan	-	v	-
2.	Rumah Makan / *Restaurant*	v	-	3
3.	Warnet	-	v	-
4.	WC Umum	v	-	1
5.	Kerajinan dari kayu	v	-	1
6.	Fasilitas Keamanan/Hansip	v	-	6
7.	Biro Perjalanan	-	v	-
8.	Tower Seluler	v	-	1
9.	Mesjid & Mushola	v	-	13

Sumber: BPS, Kec Cibadak Dalam Angka 2016.

1.**Ketersediaan fasilitas alam, budaya dan buatan**

Berdasarkan data dan informasi ini dapat dikatakan bahwa, bila dilihat dari aspek fasilitas alam , budaya dan buatan yang dimiliki, dapat dikatakan Desa Mekar Agung belum siap sebagai objek wisata syariah. dan indikator ini diperkuat pula oleh pendapat yang dikemukakan oleh 50 responden bahwa 35 orang (70%) mengatakan kurang, 10 orang (20%) mengatakan cukup, dan 5 orang (10%) mengatakan baik. Pendapat dari pemuka masyarakat mengatakan bahwa fasilitas kepariwisataan yang ada belum memadai.

2.Ketersediaan Penginapan dan *Restaurant*

Apabila kondisi ini dikaitkan dengan kesiapan Desa Mekar Agung sebagai suatu kawasan wisata yang ideal, maka dapat dikatakan belum siap untuk mempunyai fasilitas penginapan yang layak untuk bersuci dan belum banyaknya *restaurant* yang ada .Kondisi ini diperkuat pula oleh pernyataan 50 responden 74 % (37 orang) mengatakan ketersediaan infrastruktur dalam menunjang kegiatan kepariwisataan belum memadai dan sisanya 22 % (11 Orang) mengatakan cukup memadai dan 4 % (2 0rang) mengatakan baik.

b.Kesiapan Non Fisik

Adapun aspek kesiapan non fisik yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1.Ketersedian Informasi, kemudahan Transportasi (Keterjangkauan) dan Lembaga Pengelolaan Objek Wisata

Desa Mekar Agung sebagai desa wisata syariah, untuk kemudahan akses informasi wisata syariah dari hasil wawancara dapat dikatakan baik. Hal ini diperkuat yaitu menyatakan cukup 10 orang (20%) dan baik sebanyak 40 orang (80%). Untuk kemudahan transportasi dan biaya yang murah dalam keterjangkauan ke desa tersebut menyatakan baik berdasarkan pendapat dari 50 orang (100%).Bila dilihat dari aspek kemudahan yang dimiliki oleh kawasan tersebut maka untuk bisa sampai ke kawasan tersebut dapat menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum untuk masuk ke objek tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara terhadap pemuka masyarakat yang mengatakan sudah adanya angkutan umum ke objek tersebut . Sedangkan untuk kelembagaan dapat dikatakan bahwa pada desa tersebut belum ada suatu lembaga memiliki otoritas secara formal yang mendukung sertifikasi halal. Dalam merencanakan dan mengelola objek wisata tersebut, sehingga Desa Mekar Agung, berkembang tanpa suatu perencanaan dan penataan yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara terhadap pemuka masyarakat, menyatakan belum ada lembaga formal yang mengelola kawasan tersebut, sehingga untuk ketertiban kawasan tersebut inisiatif dilakukan oleh warga setempat. Keadaan ini membuktikan bahwa secara kelembagaan, bahwa Desa Mekar Agung belum siap dijadikan sebagai desa wisata syariah, walaupun pada Desa tersebut terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan.

2.Sikap Mental dan Kesiapan Masyarakat Desa Mekar Agung.

Dari pengamatan dan studi yang telah dilakukan terdapat gambaran bahwa masyarakat Desa Mekar Agung memiliki kesiapan mental untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata syariah. Beberapa indikator yang memperkuat pernyataan tersebut dikemukakan

oleh responden, menyatakan 50 % (25 orang) mengatakan cukup, 50 % (25 orang) menyatakan baik,dan pemuka masyarakat menyatakan bahwa mereka siap untuk menjadikan Desa Mekar Agung sebagai desa wisata syariah.

3.Kesiapan dari Aspek Atraksi Wisata.

Kesiapan atraksi wisata ini bila dikaitkan dengan Desa Mekar Agung , maka berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui, bahwa atraksi- atraksi wisata sudah dikelola secara baik, atraksi yang ada di desa tersebut adalah seni bela diri pencak silat , yang merupakan seni bela diri asli dari Indonesia. Seni bela diri ini tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.

4.Kesiapan Aspek Biro Perjalanan dan Pramuwisata.

Kesiapan aspek biro perjalanan, dimana meyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah masih kurang , hal ini didukung oleh pernyataan responden, 47 orang (94%) mengatakan kurang dalam mendapatkan pemandu , dan 3 orang (6 %) mengatakan cukup sedangkan tanggapan pramuwisata yaitu memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam melaksanakan tugas juga masih kurang . Hal ini didukung dari pernyataan responden yang mengatakan kurang sebesar 40 orang (80%), 5 orang (10%) mengatakan cukup dan 5 orang (10%) mengatakan baik memahami masalah kepariwisataan. Kondisi seperti ini menunjukkan behwa, dari aspek biro perjalanan dan pramuwisata desa Mekar Agung belum siap untuk menjadi desa wisata syariah.

4.3.Analisis Potensi Wisata Yang Cocok Untuk Dikembangkan Di Desa Mekar Agung

Berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Mekar Agung seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka potensi wisata yang cocok untuk dikembangkan adalah berupa wisata pedesaan dalam bentuk wisata pertanian yang bernuansa nilai-nilai Agama Islam, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Selanjutnya untuk wisata budaya adalah kesenian bela diri pencak silat. Hal ini dimaksud agar nilai dan budaya masyarakat setempat tetap dapat dilestarikan.Untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan wisata pedesaan tersebut, maka kegiatan wisata yang cocok untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel. 6 Hasil Questioner Wisata

NO	JENIS WISATA	KURANG	CUKUP	BAIK
1.	WISATA PERTANIAN	15 Orang (30%)	25 Orang (50%)	10 Orang (20%)
2.	WISATA BUDAYA	10 Orang (20 %)	20 Orang (40%)	20 Orang (40%)

Sumber: Data diolah

5. KESIMPULAN

1. Kesiapan fisik desa Mekar Agung belum siap dan layak sebagai desa wisata syariah . Pernyataan ini didukung oleh tanggapan 50 responden untuk fasilitas alam, budaya dan buatan dimana 35 orang (70%) menyatakan belum memadai, 10 orang (20%) mengatakan cukup dan 5 orang (10%) mengatakan baik. Demikian pula untuk penginapan dan *restaurant* dimana 37 orang (74%) mengatakan belum memadai, 11 orang (22%) mengatakan cukup dan 2 orang (4%) mengatakan baik.
2. Kesiapan non fisik yang terdiri dari kemudahan akses informasi wisata syariah baik, transportasi mudah dijangkau , tetapi untuk kelembagaan yang mendukung untuk kawasan tersebut secara formal belum ada, sedangkan kesiapan mental masyarakat menunjukkan indikasi yang sangat siap dan mendukung, hal ini dibuktikan dengan pernyataan responden dimana sebanyak 25 orang (50%) mengatakan cukup dan 10 orang (20%) mengatakan baik.Selanjutnya kalau dilihat dari aspek biro perjalananan dan

pramuwisata menunjukkan belum memadai untuk menjadi desa wista syariah, dimana hasil wawancara kuesioner sebanyak 40 orang (80 %) mengatakan kurang.

3. Potensi wisata yang siap dan cocok dikembangkan pada kawasan tersebut adalah wisata pertanian , 50 % dari pemuka masyarakat dan masyarakat menyatakan bahwa aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani layak untuk dikembangkan sebagai salah satu atraksi wisata.
4. Selain itu potensi wisata yang dapat dikembangkan adalah kesenian pencak silat . Namun untuk dapat menjadi atraksi wisata yang menarik perlu persiapan yang lebih matang dan pengelolaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Coe, G. P. (2001). *E-Governance and communities*: A sosial learning challenge. Social Science Computer Review, vol. 19, 80-93.

Allwinkle, Sam & Cruickshank, Peter (2011). Creating Smart-er Cities: An Overview. *Journal of Urban Technology, Vol. 18, No. 2, April 2011, 1–16.* Routledge.

BPS Kabupaten Lebak (2016), *Kecamatan Cibadak Dalam Angka* 2016. Lebak: BPS Kabupaten Lebak

Benckendorff, P.J., Sheldon, P.J. & Fesenmaier, D.R., 2014. Tourism information technology: Second edition. *Tourism Information Technology: Second Edition*, pp.1–368. Available at: http://www.scopus.com/inward/record.url

Buhalis, D., 2005. Information Technology in Tourism. In *Tourism Principles and Practice*. London: Pearson Education Limited, pp. 702–736.

Buhalis, D. & Amaranggana, A., 2014. Smart Tourism Destinations. In I. Z. Xiang & I. Tussyadiah, eds. *Information and Communication Technologies in Tourism 2014*. Heidelberg: Springer.

Buhalis, D. & Amaranggana, A., 2015. Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services. In I. Tussyadiah & A. Inversini, eds. *Information and Communication Technologies in Tourism 2015*. Switzerland: Springer International Publishing, pp. 377–389. Available at: http://link.springer.com

Chookew, S. (2015). *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in*. Journal of Economics, Business and Management, vol III (7), 277-279.

Cocchia, A. (2014). *Smart and digital city*: A systemic literature review, in Smart City. Springer International Publishing, 13-43.

Colleena, M., 2014. *Strategi Kota Barcelona Menuju Smart City*. Penelitian. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006. *Laporan Akhir Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata*,

Fesenmaier, D.R., Wöber, K.W. & Wertner, H., 2006. Destination recommendation systems behavioural foundations and applications., p.347. Available at: http://cataleg.urv.cat/record

Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). *E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations*. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216.

Gretzel, U. et al., 2015. Smart tourism: foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), pp.179–188. Available at: http://link.springer.com

Griffinger, R., dkk (2007). *Smart cities Ranking of European medium-sized cities.* Final report October.

Hall, R. E. (2000). *The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop*, Paris, France, Sep 28.

Harrison, C. dkk. (2010). Foundations for Smarter Cities. *IBM Journal of Research and Development, 54*.

Kartajaya, H. & Nirwandar, S., 2013. *Tourism Marketing 3.0 Turning Tourist to Advocate* K. L. Rachman, ed., Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Munirah, L. I. (2012). *Muslim Tourists Typologi in Malaysia*: Perspectives and Challenges. Proceeding of the Tourism and Hospitality International Conference. Malaysia. Departmnet of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment